

**STRATEGI PENERAPAN KATEGORISASI
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DALAM PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Disusun Oleh:

NAMA : RENY ASMIYANTI
NPM : 2242021087
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr. Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Reny Asmiyanti
NPM : 2242021087
Jurusan : Adminsitasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Strategi Penerapan Kategorisasi Usaha Mikro Kecil
(Bahasa Indonesia) Dan Menengah Dalam Program Jakarta Entrepreneur
Daerah Khusus Jakarta
Judul Tesis : *Strategy for Implementing Categorization on Micro*
(Bahasa Inggris) *Small and Medium Enterprises at Jakarta*
Entrepreneur Program in the Province of Jakarta

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA)

Pembimbing II



(Dr Firman Hadi Rivai, MPA)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RENY ASMIYANTI
NPM : 2242021087
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : STRATEGI PENERAPAN KATEGORISASI PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM
PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR DI
PROVINSI DKI JAKARTA

Telah mempertahankan Tesis di hadapan
Tim Penguji Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 01 Juli 2024
Pukul : 13.00 s. d selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Sekretaris : Dr Ridwan Rajab, M. Si

Anggota : Dr. Asropi, M. Si

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA

Pembimbing 2 : Dr Firman Hadi Rivai, MPA



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reny Asmiyanti
NPM : 2242021087
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun dengan judul “Strategi Penerapan Kategorisasi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Program Jakarta Entrepreneur di Provinsi DKI Jakarta” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulis tesis ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun

Jakarta, 03 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



(Reny Asmiyanti)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan anugerah-ya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Strategi Penerapan Kategorisasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Program Jakarta Entrepreneur di Provinsi DKI Jakarta”. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr. Ap) pada Program Magister Terapan, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA dan Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan berbagai arahan, koreksi, saran dan masukan dalam penulisan tesis ini, serta memberikan dorongan semangat dan mengingatkan untuk selalu tetap bimbingan.
2. Ibu Dr. Mala Sondang Silitinga, M. A, Bapak Dr. Ridwan Rajab M. Si dan Bapak Dr. Asrofi M. Si selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan berbagai saran dan masukan guna menyempurnakan penelitian pada tesis ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar pada Magister Manajemen Pembangunan Daerah yang berkenan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh perkuliahan dan Mba Seha yang membantu proses administrasi dalam kelancaran selama masa perkuliahan.
4. Para Narasumber yang luar biasa Bapak Aditya Pratama Yudha S selaku Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Frida Elizabeth selaku Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Daerah Khusus Jakarta, Bapak Juremi selaku Kepala Pusat Data dan Informasi PPKUKM Daerah Khusus Jakarta, Bapak Dwityo Agung Darpito selaku Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah, , Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Daerah Khusus Jakarta, Ibu Eman Fasianti selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, , Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Daerah Khusus Jakarta, Bapak Badia Raja Siregar selaku SubKelompok Pemasaran, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, bapak Ferdinand Renald

Selaku Kasatpel Kecamatan, Bapak fadryan Kirana Selaku Pendamping Kecamatan, para pelaku UMKM yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

5. Bapak H. Mulyadi dan Ibu Hj Kustini Selaku Orang Tua, Alm. Bapak Helmy Sukur dan Almh.Ibu Nirma Munir selaku Mertua, serta kakak-kakak saya atas doa, dukungan, motivasi dan semangat dalam penyusunan tesis.
6. Suami tercinta Bapak Rossiano Irfian Sukur, anak-anaku tersayang Nabilah Syafira Sukur dan Muhammad Refian Sukur, yang selalu setia untuk memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi yang selalu mendampingi setiap proses pembuatan tesis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
7. Ibu Ratu Rante Allo selaku Kepala Dinas PPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Etty Syartika Selaku Sekdis PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Parulian Tampubolon Selaku Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Adm Jakarta Selatan yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan untuk memberikan izin belajar kepada saya.
8. Teman-teman MPD 2022 Pak Tomi, Pak Lian, Pak Endang, Pak Imam, Pak Reza, Ibu Aini, Ibu Riya dan Ibu Linda yang tatap kompak dan saling mendukung serta berbagi informasi selama perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini.
9. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaku UMKM di DKI Jakarta. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung selama proses penyusunan tesis ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuannya.

Jakarta, 03 Juli 2024

Reny Asmiyanti

ABSTRAK

STRATEGI PENERAPAN KATEGORISASI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR DI PROVINSI DKI JAKARTA

Reny Asmiyanti

Email : reny.2242021087@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi penyebab belum optimalnya Penerapan Kategorisasi Program Jakarta *Entrepreneur* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, berdasarkan implentasi kebijakan teori Merilee S Grindle yang meliputi isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan telaah dokumen. Pada proses analisisnya menggunakan analisis SWOT sebagai instrumen utama dalam penyusunannya, kemudian langkah selanjutnya untuk menentukan alternatif isu strategis digunakan dengan *litmus test*, dengan diperoleh isu yang paling strategis dengan memperkuat komitmen pemerintah dalam penerapan kategorisasi UMKM dalam program Jakarta entrepreneur untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM. Dari hasil identifikasi tersebut ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas UMKM dari wirausaha pemula menjadi wirausaha menengah hingga menjadi wirausaha mapan. Untuk itu penelitian ini penting dilakukan untuk identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM menjadi langkah penting dalam merancang strategi dan program yang tepat untuk meningkatkan kondisi usaha pelaku UMKM.

Kata Kunci: Strategi, UMKM, Program Jakarta Entrepreneur

ABSTRACT

STRATEGY FOR IMPLEMENTING CATEGORIZATION ON MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AT JAKARTA ENTREPRENEUR PROGRAM IN THE PROVINCE OF JAKARTA

Reny Asmiyanti

Email : reny.2242021087@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

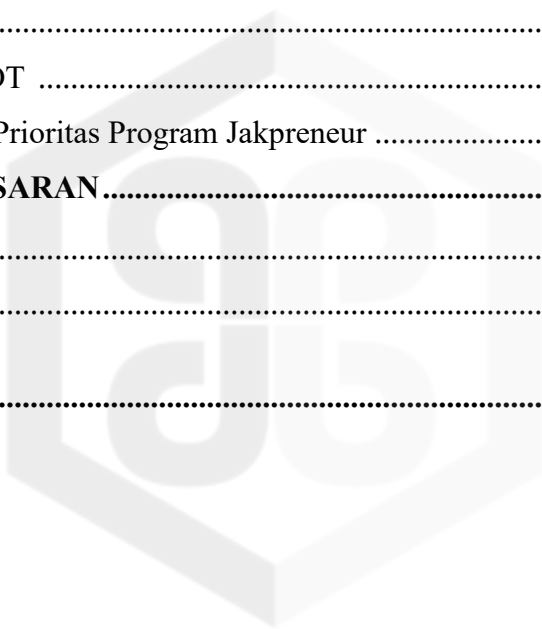
This study aims to identify and formulate strategies that cause the suboptimal implementation of the Jakarta Entrepreneur Program Categorization for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in DKI Jakarta Province. In this study, based on Merilee S Grindle's policy implementation theory which includes the content of policy and the context of implementation. This research method uses a descriptive and qualitative approach with data collection conducted by interview and document review. In the analysis process using SWOT analysis as the main instrument in its preparation, then the next step to determine alternative strategic issues is used with a litmus test, with the most strategic issue obtained by strengthening the government's commitment to implementing MSME categorization in the Jakarta entrepreneur program to improve the quality of MSME actors. From the results of this identification, it was found that there are several problems faced by the government and micro, small and medium enterprises (MSMEs) in improving the quality of MSMEs from beginner entrepreneurs to medium entrepreneurs to established entrepreneurs. For this reason, this research is important to identify the challenges and obstacles faced by MSME actors to be an important step in designing the right strategies and programs to improve the business conditions of MSME actors.

Keywords: Strategy, MSMEs, Jakarta Entrepreneur Program

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	27
1. Tinjauan Kebijakan	27
2. Tinjauan Teoritis	35
C. Kerangka Berfikir	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Metode Penelitian	61
B. Teknik Pengumpulan Data	61
C. Teknik Pengelolaan Dan Analisa Data	66
D. Lokus Penelitian	71
E. Prosedur Validasi Data	72
F. Instrumen Penelitian	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Gambaran Umum Lokus Penelitian	74
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	74
2. Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	79
B. Hasil dan Analisa Penelitian	85
1. Identifikasi Penyebab Belum Optimalnya Penerapan Kategorisasi Pada UMKM	
Dalam Program Jakarta Enterpreneur	86
1.1 <i>Content of Policy</i> (Isi Kebijakan).....	86
1.2 <i>Context of Implementation</i>) Lingkungan Kebijakan	135
2. Strategi Optimalisasi Penerapan Kategorisasi pada UMKM dalam Program	
Jakarta Entrepreneur	156
2.1 Hasil Analisis SWOT	159
2.2 Strategi Penerapan Prioritas Program Jakpreneur	171
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....	183
A. Simpulan.....	183
B. Saran	187
DAFTAR PUSTAKA.....	189


POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2019	2
Tabel 1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Kelas Usaha di Indonesia Tahun 2021	3
Tabel 1.3 Peserta Program Jakarta Entrepreneur Berdasarkan Gender	8
Tabel 1.4 Peserta Program Jakpreneur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023	8
Tabel 1.5 Data Reaktivasi Jakpreneur Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2023	11
Tabel 1.6 Data Klasterisasi Peserta Program Jakarta Entrepreneur Pada Tahun 2023	14
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep Teori Merilee S Grindle	53
Tabel 2.3 Parameter Kategorisasi UMKM di Provinsi DKI Jakarta	58
Tabel 3.1 Kategori Informan	64
Tabel 3.2 Matrik SWOT	68
Tabel 3.3 Tes Litmus	69
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	75
Tabel 4.2 Jumlah Peserta Program Jakpreneur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2013	80
Tabel 4.3 Persentase Berdasarkan Jenis Usia	84
Tabel 4.4 Parameter Berdasarkan Kategorisasi Binaan Jakpreneur	87
Tabel 4.5 Fasilitas Pendampingan Dinas PPKUKM Prov DKI Jakarta	100
Tabel 4.6 Jumlah UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	103
Tabel 4.7 Capaian Omset, Aset dan Tenaga Kerja Program Jakarta Entrepreneur Periode Tahun 2023	109
Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta	132
Tabel 4.9 Capaian Pemasaran Jumat Beli Lokal Dinas PPKUKM Prov DKI Jakarta Tahun 2021-2023	141
Tabel 4.10 Hasil Identifikasi Penyebab tidak optimalnya penerapan kategorisasi pada UMKM Dalam Program Jakarta Entrepreneur di Provinsi DKI Jakarta variable isi kebijakan (<i>content policy</i>)	148

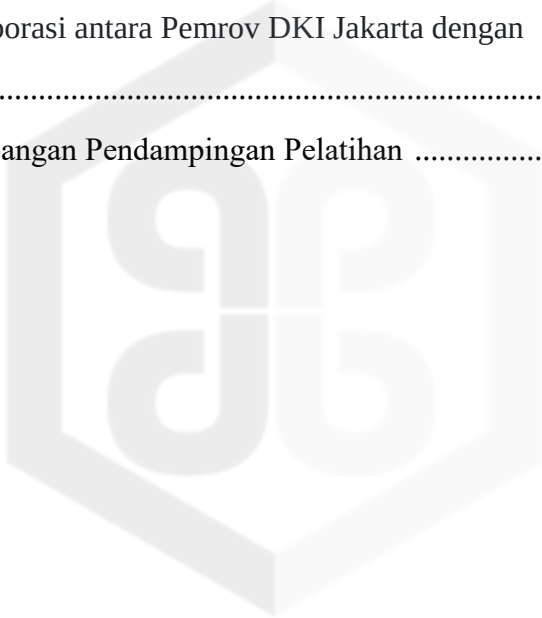
Tabel 4.11 Hasil Identifikasi Penyebab tidak optimalnya penerapan kategorisasi pada UMKM Dalam Program Jakarta Entrepreneur di Provinsi DKI Jakarta variable lingkungan kebijakan (<i>context of implementation</i>)	153
Tabel 4.12 Temuan dan Permasalahan Diskusi FGD dalamProgram Jakpreneur...	157
Tabel 4.13 Faktor Internal dan Faktor Eksternal Penerapan Kategorisasi pada UMKM dalam Program Jakarta Entrepreneur di DKI Jakarta	158
Tabel 4.14 Matriks Analisis SWOT	159
Tabel 4.15 Analisis Tes Litmus	173
Tabel 4.16 Pengelompokan Strategis Program Jakpreneur	174
Tabel 4.17 Capaian Jumlah Peserta Klasterisasi Kelompok Usaha Jakpreneur	177
Tabel 4.18 Penerapan Prioritas Strategi Program Jakpreneur	178



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	60
Gambar 4.1 Peta Sebaran Jumlah UMKM di DKI Jakarta	76
Gambar 4.2 Observasi Lapangan Pendampingan Fasilitas Izin Edar MD	95
Gambar 4.3 Observasi Lapangan Tenaga Kerja Pelaku Usaha	97
Gambar 4.4 Observasi Lapangan Pelaku Usaha Menengah.....	105
Gambar 4.5 Observasi Lapangan Pelaku Usaha Pemula	106
Gambar 4.6 Observasi Lapangan Pelaku Usaha Mapan.....	106
Gambar 4.7 Observasi Lapangan Pelaksanaan Bazar Tingkat Kecamatan	119
Gambar 4.8 Observasi Lapangan Pelaksanaan Bazar Tingkat Provinsi	119
Gambar 4.9 Pelatihan Kolaborasi antara Pemrov DKI Jakarta dengan Pihak Swasta	143
Gambar 4.10 Observasi Lapangan Pendampingan Pelatihan	144



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2022	4
Grafik 1.2 Perbandingan Kepemilikan Usaha Peserta Jakpreneur Berdasarkan Tahun 2019 s.d Tahun 2023	10
Grafik 4.1 Usia Peserta Program Jakarta Entrepreneur Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta	82
Grafik 4.2 Pendidikan Peserta Program Jakarta Entrepreneur Dinas PPKUKM Prov DKI Jakarta	83
Grafik 4.3 Kondisi Jakpreneur Berdasarkan Tempat Usaha	113
Grafik 4.4 Kondisi jakpreneur berdasarkan Kepemilikan Kendaraan Operasioanal	114
Grafik 4.5 Kondisi Jakpreneur terhadap Jumlah Tenaga Kerja	116
Grafik 4.6 Kondisi Jakpreneur terhadap Jumlah Omset Tahunan	117

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Diagram Analisa SWOT	67
Diagram 4.1 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	78
Diagram 4.2 Jenis Kelamin Peserta Program Jakarta Entrepreneur Dinas PPKUKM Prov DKI Jakarta	81



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Pedoman Observasi
- Lampiran 5 : Transkrip Sebagian Wawancara
- Lampiran 6 : LOA Publikasi
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

STRATEGI PENERAPAN KATEGORISASI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR DI PROVINSI DKI JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terlihat cukup signifikan jika dilihat dari jumlahnya. UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, menjadi pengaman serta penggerak ekonomi. Pertumbuhan UMKM di Indonesia ditandai oleh siklus transaksi yang cepat dan produk-produk yang umumnya berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada dinamika ekonomi di berbagai wilayah, yang sebagian besar didorong oleh aktivitas UMKM. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat 65,47 juta unit UMKM, yang menyumbang 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM juga berkontribusi sebesar 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku dan 57,14% terhadap PDB atas harga konstan.

Indonesia memiliki potensi ekonomi nasional yang kuat berkat jumlah UMKM yang signifikan, terutama usaha mikro, yang menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah dan pelaku usaha perlu mendorong usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah. Usaha mikro juga telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, usaha mikro memiliki siklus transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik, dan memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Mengakui potensi besar UMKM, pemerintah telah menerapkan kebijakan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat berkembang menjadi usaha menengah hingga usaha besar yang mapan.

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong dan mempromosikan peran penting UMKM dalam perkembangan ekonomi negara. Peran usaha mikro menjadi semakin krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan UMKM saat ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan di tingkat daerah maupun nasional (Julialevi, 2022). Manfaat ini termasuk distribusi pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor informal, karena sektor formal belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja

yang ada. Upaya penyerapan tenaga kerja ini dapat diperkuat dengan mengembangkan sektor kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah tenaga kerja di UMKM mencapai 119,562 juta orang pada tahun 2019. Angka ini meningkat sebesar 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 117 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia, sementara 3,08% sisanya berasal dari usaha besar sebanyak 3,8 juta orang. Data ini tercermin dalam tabel di bawah, yang menunjukkan kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian nasional.

Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2019

Kategori	Jumlah Unit Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase
Usaha Mikro	109.842.384	97.803.659 Orang	89,04%
Usaha Kecil	5.930.317	285.248 Orang	4,81 %
Usaha Menengah	3.790.142	116.357 Orang	3,07%
Total UMKM	119.562.843	98.205.264 Orang	96,92 %

Sumber Kementerian Koperasi UKM diolah Penulis Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1, usaha mikro mendominasi baik dalam jumlah unit usaha maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan lebih dari 109 juta unit usaha dan menyerap sekitar 97,8 juta tenaga kerja, usaha mikro memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam menyediakan lapangan kerja. Usaha kecil dan menengah juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun dalam persentase yang lebih kecil dibandingkan usaha mikro. Usaha kecil menyerap 4,81% dari total tenaga kerja UMKM, sedangkan usaha menengah menyerap 3,07%. Secara keseluruhan, UMKM menyerap sekitar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Ini menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional dalam penciptaan lapangan kerja. Pemerintah dan pelaku usaha harus terus mendukung dan meningkatkan kapasitas UMKM, terutama usaha mikro yang terbukti mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja. Strategi untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah juga penting agar dapat lebih berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan perekonomian secara keseluruhan.

Di Indonesia, usaha mikro, dengan omset maksimal Rp2 miliar per tahun, mendominasi struktur UMKM. Pada tahun 2021, terdapat 63.955.369 unit usaha mikro, yang menyumbang 99,62% dari total unit usaha di Indonesia. Proporsi ini tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, usaha kecil, dengan omset Rp2-15 miliar per tahun, hanya berjumlah 193.959 unit, menyumbang 0,3% dari total UMKM. Usaha menengah, dengan omset Rp15-50 miliar per tahun, berjumlah 44.728 unit atau 0,07%. Terakhir, usaha besar, dengan omset lebih dari Rp50 miliar per tahun, berjumlah 5.550 unit atau 0,01%. Data ini dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Kelas Usaha di Indonesia Tahun 2021

Kelas Usaha	Jumlah Omset	Jumlah Unit UMKM	Kontribusi
Usaha Mikro	Omset $\leq$ Rp2 miliar/tahun	63,955,369	99.62
Usaha Kecil	Omset Rp2-15 miliar/tahun	193,959	0.30
Usaha Menengah	Omset Rp15-50 miliar/tahun	44,728	0.07
Usaha Besar	Omset $>$ Rp 50	5,550	0.01

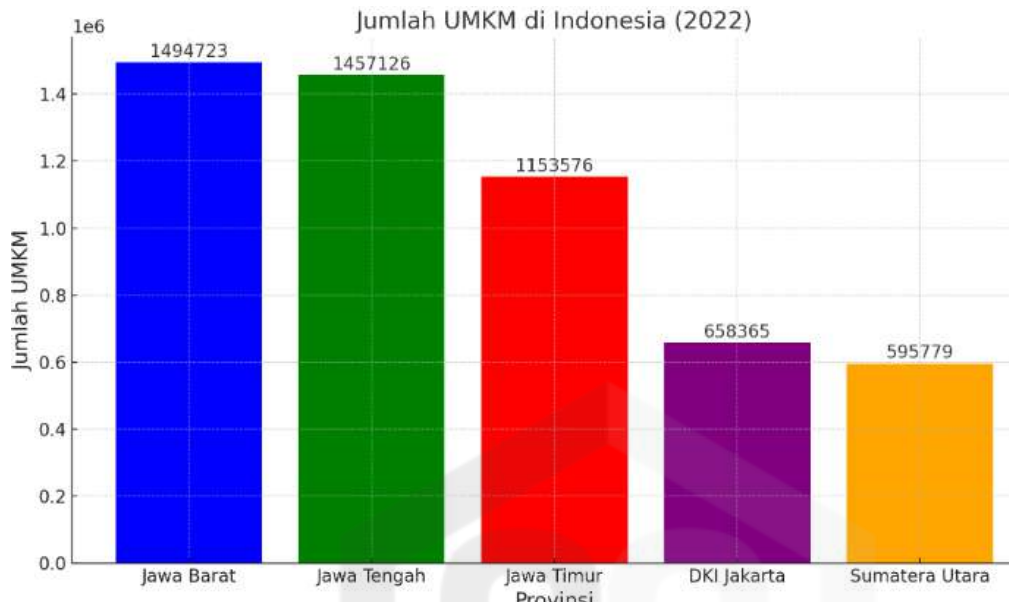
Sumber databoks.katadata.co.id, 2023

Menurut data Kementerian Keuangan, sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan naik kelas, minim akses digitalisasi, kesulitan menembus pasar global, dan kurangnya layanan finansial. UMKM adalah tulang punggung perekonomian, memainkan peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dominasi sektor perdagangan dalam UMKM di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingginya permintaan konsumen, mudahnya akses ke pasar, dan relatif rendahnya modal awal yang dibutuhkan dibandingkan dengan sektor lain.

Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pertumbuhan UMKM di Indonesia hingga 2022 mencapai 8,77 juta unit usaha. Pertumbuhan ini memberikan optimisme bagi perekonomian Indonesia. Dari banyaknya pelaku UMKM yang tersebar di 34 provinsi, lima posisi tertinggi adalah Jawa Barat di posisi puncak dengan 1.494.723 unit. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah dengan 1.457.126 unit, diikuti oleh Jawa Timur dengan 1.153.576 unit. DKI Jakarta berada di urutan keempat dengan 658.365

unit. Meskipun urutan pertama hingga keempat didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera Utara menempati urutan kelima dengan 595.779 unit UMKM.

Grafik 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2022



Sumber Kementerian Koperasi UKM, diolah peneliti 2023

Menurut laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022, DKI Jakarta menempati urutan keempat dengan 658.365 unit UMKM dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Jumlah UMKM yang besar ini membuka peluang untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan representatif tentang pengembangan UMKM. Selain itu, dengan banyaknya UMKM, akan lebih mudah menemukan sampel penelitian yang sesuai. Pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UMKM. Keistimewaan ini menjadikan DKI Jakarta sebagai tempat yang menarik untuk penelitian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan bahwa tugas pemerintah pusat dan daerah adalah mendukung, membimbing, dan memfasilitasi kegiatan untuk mengembangkan kewirausahaan secara berkelanjutan dan konsisten di tingkat nasional. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan kewirausahaan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan program-program yang mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan program-program ini sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah juga akan diawasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kewirausahaan perlu diintegrasikan sebagai bagian dari gerakan ekonomi melibatkan seluruh rakyat, didukung oleh dukungan politik dan hukum dari Pemerintah di tingkat nasional maupun lokal. Pemerintah perlu merancang rencana strategis dan implementatif dalam bidang kewirausahaan dengan pendekatan manajemen yang terintegrasi. Selain dari tingkat nasional, Pemerintah Daerah juga harus memiliki perspektif global dalam merumuskan kebijakan pro kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing daerah (Purbasari, 2019). Pemerintah Daerah harus menetapkan pengembangan usaha mikro dan kecil sebagai prioritas, mengingat peran penting mereka dalam mendukung upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian, diperlukan strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenali pentingnya pemberdayaan UMKM melalui pengembangan kewirausahaan terpadu yang dikenal dengan program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur). Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah binaan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Jakpreneur merupakan re-branding dari program sebelumnya, yaitu Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di DKI Jakarta. Awalnya, program ini dikenal dengan nama Oke Oce yang diatur oleh Instruksi Gubernur 152 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengembangan Kewirausahaan. Pada tahun 2018, terbit Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya terkait pengembangan kewirausahaan di DKI Jakarta, di mana pemberdayaan UMKM disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM yang menjadi peserta Program Jakarta Entrepreneur, tidak lagi harus berurutan melainkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program Jakarta *Entrepreneur* (Jakpreneur) adalah sebuah platform yang ditujukan untuk warga yang kreatif dan inovatif dalam mendirikan serta mengembangkan usaha skala

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nama Jakpreneur berasal dari gabungan kata "Jak" yang merujuk pada Jakarta dan "*preneur*" dari kata *entrepreneurship*. Melalui program ini, pelaku UMKM akan memperoleh akses untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam mengembangkan usaha mereka melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov), institusi pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai lembaga dan pihak lainnya.

Program Jakpreneur memberikan pendampingan bagi calon wirausahawan di DKI Jakarta, termasuk dukungan dalam permodalan, pemasaran, ide kreatif, laporan keuangan, penyelesaian masalah usaha, hingga pelatihan untuk menjadi pelaku usaha yang unggul. Selain itu, peserta Jakpreneur akan difasilitasi untuk memperoleh dokumen perizinan dan/atau non-perizinan sesuai dengan usaha yang mereka jalankan. Terhadap fasilitasi yang diberikan peserta dapat mengakses melalui sistem Jakarta Entrepreneur. Sistem Jakarta Entrepreneur dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur perkembangan Program Jakarta *Entrepreneur*.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 terdapat 6 (enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan kepada Peserta JakPreneur yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Khusus Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Daerah Khusus Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sosial Daerah Khusus Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut pelaksanaan fasilitas diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Program Jakarta Entrepreneur memiliki 7 langkah dalam alur kerjanya, dimana langkah – langkah tersebut terhimpun pada P7 yaitu (1) Pendaftaran; (2) Pendampingan; (3) Pelatihan; (4) Perizinan; (5) Pemasaran; (6) Pelaporan keuangan; dan (7) Permodalan. Termasuk peningkatan efisiensi usaha melalui mekanisme yang mampu mengintegrasikan ketujuh tahapan dalam program Pengembangan Kewirausahaan dalam Program Jakpreneur. Berbagai upaya yang telah dilakukan namun belum terlihat hasil yang signifikan peningkatan kualitas JakPreneur.

Dari 6 SKPD pengampu program Jakpreneur, dimana masing – masing SKPD memiliki peran dan segmentasi tersendiri dalam mengentaskan angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk penjelasan tugas pokok dan fungsi serta segemntasi anggota dari keenam SKPD tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi DKI Jakarta memiliki target wirausaha yang memiliki jenis usaha kuliner, *fashion* dan *craft*. DPPKUKM merupakan *leading sector* dari program Jakpreneur. Dimana fasilitasi yang dapat diberikan dari DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta untuk anggota jakpreneur adalah fasilitasi pendampingan, pelatihan APBD, pelatihan kolaborasi, pelatihan wirausaha industri baru, pelatihan e-smart, fasilitas perizinan berupa pembuatan NIB, PIRT, sertifikasi halal, sertifikasi HKI, sertifikasi izin edar makanan dalam dan lain-lain. Untuk pemasaran, fasilitasi yang dapat diberikan berupa kurasi, bazar dan eorder. Sedangkan untuk pemodal adalah akses kredit usaha kepada Bank pelat merah seperti Bank DKI Jakarta, Bank Mandiri Bank BTN dan Bank BNI.
- 2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) Provinsi DKI Jakarta yang memiliki segmentasi anggota untuk tenaga kerja mandiri (*free lance*) untuk bidang teknis. Fasilitasi yang dapat diberikan adalah pelatihan berupa pelatihan teknis berupa pelatihan teknis pengelasan, service AC dan lain-lain.
- 3) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta memiliki segmentasi untuk anggota jakpreneur yang memiliki profesi sebagai petani dan nelayan. Untuk jenis fasilitasi yang dapat diberikan oleh DKPKP Provinsi DKI Jakarta adalah pelatihan untuk mengolah makanan yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
- 4) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta memiliki segmentasi anggota jakpreneur berupa ibu rumah tangga atau remaja Dimana fasilitasi yang dapat diberikan adalah berupa pelatihan untuk kader PKK dan Dasawisma yang ada di tiap kecamatan.
- 5) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta yang memiliki segmentasi berupa para pelaku ekonomi kreatif dan penduduk yang berada pada wilayah pariwisata untuk dapat mendukung potensi wisata yang ada. Adapun fasilitasi yang dapat diberikan kepada binaan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta adalah pelatihan untuk pembuatan kerajinan dan makanan ringan untuk pengunjung wisata; dan
- 6) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki segmentasi berupa para warga penyandang kesejahteraan sosial dan disabilitas. Dimana pelatihan yang diberikan adalah pelatihan untuk penyandang disabilitas penerima bansos kartu penyandang disabilitas Jakarta (KPDJ) dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berusia 17-59 Tahun serta telah memiliki usaha.

Adapun dari jumlah peserta yang terdaftar menjadi anggota Jakarta *Entrepreneur* sebanyak 371.984 bahwa dapat dikategorikan pelaku usaha berdasarkan gender dimana dominasi dari ketertarikan untuk mengikuti program jakarta entrepreneur adalah perempuan dengan data perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Peserta Program Jakarta Entrepreneur Berdasarkan Gender

Perempuan	Presentase (%)	Laki-Laki	Presentase (%)
244.952	65,85%	127.032	34,15%

Sumber Data Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 bahwa Partisipasi perempuan dalam Program Jakarta *Entrepreneur* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Hal ini menunjukkan minat dan keterlibatan yang signifikan dari perempuan dalam pengembangan kewirausahaan di Jakarta. Persentase partisipasi perempuan yang lebih tinggi menunjukkan adanya potensi besar untuk memperkuat peran perempuan dalam ekosistem kewirausahaan UMKM di wilayah Jakarta. Terdapat 244.952 peserta perempuan, yang menyumbang 65,85% dari total peserta program. Terdapat 127.032 peserta laki-laki, yang menyumbang 34,15% dari total peserta program. Program Jakarta *Entrepreneur* adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha, khususnya dalam skala UMKM, di wilayah Jakarta. Program ini memiliki fokus pada pembinaan dan pengembangan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi wirausaha yang sukses.

Adapun jumlah peserta program jakarta *entrepreneur* yang sudah tergabung dalam program tersebut dari tahun 2018 hingga tahun 2023 sebanyak 371.984, data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4 peserta program jakpreneur dari enam Dinas Pengampu sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Peserta Program Jakarta *Entrepreneur* Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023

Dinas Pengampu Program Jakpreneur	Jumlah Peserta Program Jakpreneur					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21,888	27,360	38,304	46,513	54,721	84,818
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, serta	2,406	3,007	4,211	5,113	6,0158	9,324
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,264	2,830	3,962	4,811	5,660	8,773

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1,546	1,933	2,706	3,286	3,866	5,995
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Khusus Jakarta	919	1,149	1,609	1,954	2,299	3,564
Dinas Sosial	733	916	1,283	1,558	1,833	2,842
Jumlah	29,758	37,198	52,077	63,237	74,396	115,318

Sumber Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Daerah Khusus Jakarta, 2023

Analisis data peserta Program Jakpreneur dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan peningkatan pertumbuhan di berbagai dinas pengampu program. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki jumlah peserta terbanyak setiap tahun. Pada tahun 2018, tercatat 21,888 peserta dan meningkat terus hingga mencapai 84,818 peserta pada tahun 2023. Ini mencerminkan peran krusial dinas ini dalam mengembangkan sektor UMKM di Jakarta. Dengan keterlibatan berbagai dinas, program ini mampu menjangkau berbagai sektor dan komunitas, menyediakan pelatihan, pendampingan, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi warga Jakarta. Meskipun jumlah yang terdaftar dalam Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dibandingkan 6 SKPD Pengampu yang lainnya namun kualitas peserta program jakpreneur belum menunjukkan angka yang signifikan melihat anggaran APBD yang ada dalam Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Anggaran terbesar untuk memfasilitasi Kegiatan Penumbuhan Kewirausahaan di DKI Jakarta.

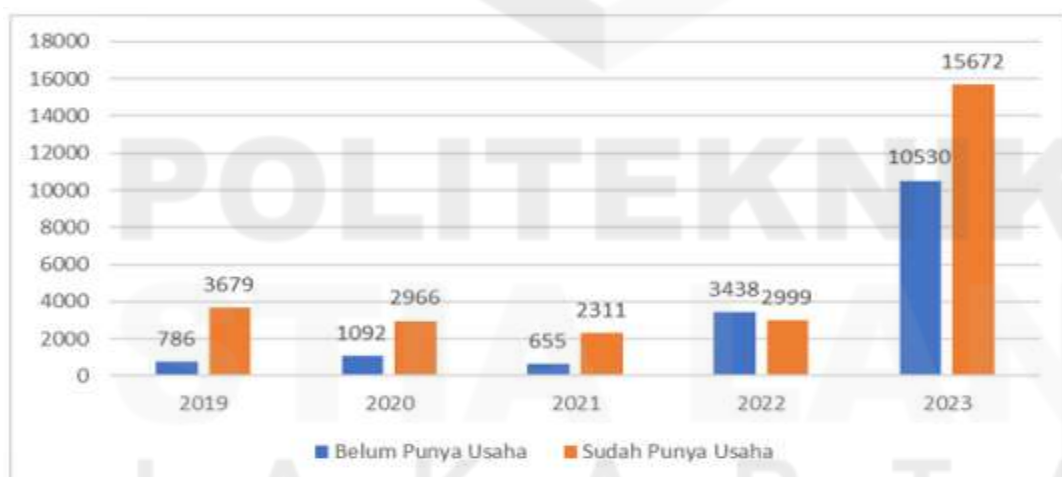
Sehubungan dengan data jumlah peserta Program Jakarta *Entrepreneur*, maka untuk mendapatkan anggota Jakarta *Entrepreneur* yang berkualitas, DKI Jakarta membuat fitur reaktivasi dalam sistem website jakpreneur yang berguna untuk mengetahui secara jelas dan detail terkait dengan usaha/rencana usaha yang dimiliki oleh peserta Jakpreneur sehingga terlihat peserta usaha yang aktif dan pasif serta agar informasi tersebut dapat berguna dengan baik untuk kemudian bisa mendapatkan program pengembangan yang tepat sesuai kebutuhan peserta. bahwa jumlah keseluruhan peserta yang telah melakukan reaktivasi mencapai 44.128 orang. Dari jumlah tersebut, 27.627 peserta telah memiliki usaha sedangkan 16.501 peserta masih belum memiliki usaha. sebanyak sebanyak 53% peserta yang telah melakukan reaktivasi

telah diverifikasi dan baru 12% peserta yang melakukan reaktivasi dari 349.770 peserta aktif. Jumlah ini perlu ditingkatkan kembali, mengingat belum ada setengah dari peserta aktif telah melakukan reaktivasi dan terverifikasi.

Selanjutnya terkait dengan peserta reaktivasi yang belum memiliki usaha sebanyak 37% dari total peserta reaktivasi. Peserta yang belum memiliki usaha terbanyak terdapat pada tahun 2023 dengan 10.530 peserta, sedangkan untuk yang terendah ada pada tahun 2021 dengan 655 peserta. Sedangkan untuk peserta reaktivasi yang memiliki usaha didominasi oleh peserta tahun 2023 yaitu sebanyak 15.672 peserta. Perlu adanya pembaharuan informasi yang ada pada peserta yang belum memiliki usaha setiap 6 bulan sekali, untuk mengetahui jumlah peserta yang aktif dan tidak aktif, serta untuk mengetahui perkembangan rencana usaha yang dibuat, sehingga peserta didampingi sampai pada pendirian usaha.

Pada tahun 2023, jumlah peserta yang belum memiliki usaha mencapai 10.530 peserta, yang merupakan angka tertinggi dalam rentang waktu yang disediakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, banyak individu yang mengikuti program atau layanan yang ditawarkan untuk membantu mereka memulai usaha. Jumlah yang tinggi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya kewirausahaan, dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait, atau mungkin adanya perubahan dalam kondisi ekonomi yang mendorong orang untuk mencari peluang baru.

Grafik 1.2 Perbandingan Kepemilikan Usaha Peserta Jakarta *Entrepreneur* Berdasarkan Tahun 2019- 2023



Sumber Dinas PPKUKM Daerah Khusus Jakarta, Diolah Penulis 2023

Data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pergerakan peserta yang belum memiliki usaha dan peserta jakpreneur yang telah melakukan reaktivasi dalam sistem jakpreneur dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan pentingnya program-program yang mendukung kewirausahaan, namun juga menyoroti perlunya evaluasi terus-menerus untuk memastikan efektivitas dan relevansi dari program-program tersebut.

Tabel 1.5 Data Reaktivasi Jakpreneur Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2023

Jenis Usaha	Jumlah Peserta Jakpreneur
Kuliner	18.005
Fashion	2.747
Kerajinan/ Craft	1.552
Lainnya	5.323
Total	27.627

Sumber Website Jakpreneur, diolah peneliti 2023

Peneliti melakukan analisa terkait dengan Data Reaktivasi Jakarta *Entrepreneur*, terlihat bahwa jumlah peserta yang telah mendaftar dalam kategori kuliner mencapai 18.005 orang, diikuti oleh fashion dengan 2.747 peserta, dan kerajinan/craft dengan 1.552 peserta. Sementara itu, kategori lainnya memiliki 5.323 peserta. Total keseluruhan peserta yang terdaftar reaktivasi profil usaha mencapai 27.627 orang. Berdasarkan data ini, direkomendasikan untuk menggunakan Data Jakarta *Entrepreneur* sebagai database calon peserta yang akan diikuti dalam kegiatan kurasi produk. Dengan jumlah peserta yang signifikan dalam berbagai kategori, akan memungkinkan penyelenggara kegiatan untuk memilih beragam produk berkualitas untuk dipamerkan atau dipasarkan.

Dalam rangka membangun daerah melalui pemberdayaan UMKM, penting untuk mengadopsi pendekatan yang terfokus dan responsif terhadap kebutuhan setiap wilayah administratif. Dengan demikian, akan tercipta kesempatan yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Strategi kategorisasi UMKM tidak hanya memungkinkan pemerintah untuk memberikan dukungan yang tepat, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memantau pertumbuhan sektor UMKM secara menyeluruh, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan ini tetap relevan dan efektif dalam mendukung keberhasilan UMKM di lapangan. Selain itu, kolaborasi

antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait, dan pelaku bisnis lokal juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat dari strategi kategorisasi ini. Penting untuk diingat bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi suatu daerah, dan dengan memberikan dukungan yang tepat melalui kategorisasi, pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam konteks penerapan kategorisasi ini, ada beberapa harapan yang diinginkan, seperti peningkatan produktivitas, peningkatan akses ke pasar, dan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Namun, juga ada tantangan yang mungkin dihadapi, seperti menentukan kriteria kategorisasi yang tepat dan memastikan bahwa pendekatan ini inklusif dan adil bagi berbagai jenis usaha. Penting untuk memperhatikan bahwa setiap tahap memiliki karakteristik dan tantangan khusus, dan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait perlu memberikan dukungan yang sesuai dengan tahap pertumbuhan masing-masing UMKM.

Penerapan kategorisasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengacu pada proses mengelompokkan atau mengklasifikasikan UMKM ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemberian dukungan, bantuan, dan intervensi yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kategori UMKM.

Secara lebih rinci, penerapan kategorisasi pada UMKM dapat meliputi aspek-aspek berikut:

- a). Pihak yang menerapkan kategorisasi, seperti pemerintah atau lembaga terkait, perlu menentukan kriteria atau parameter yang akan digunakan untuk mengkategorikan UMKM. Kriteria ini dapat meliputi sektor usaha, skala usaha (kecil atau mikro), tingkat perkembangan usaha (wirausaha pemula, wirausaha menengah dan wirausaha mapan), lokasi usaha, jenis produk/jasa, dan lain sebagainya.
- b). Proses kategorisasi memerlukan pengumpulan data dan informasi yang relevan dari UMKM yang akan dikategorikan, seperti jumlah tenaga kerja, omset, aset, jenis usaha, dan informasi lainnya yang sesuai dengan kriteria kategorisasi yang ditetapkan.
- c). Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, UMKM kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan kriteria kategorisasi yang digunakan.
- c). Setelah UMKM terkategori, pihak yang menerapkan kategorisasi dapat menyusun program, kebijakan, skema pendanaan, pelatihan, atau dukungan lainnya yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik dari masing-masing kategori UMKM.

- d). Implementasi kategorisasi pada UMKM perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dalam mendukung pengembangan UMKM.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta membuat 10 parameter utama dengan 36 sub parameter yang merupakan cakupan untuk dapat mengukur keberhasilan dari pelaku usaha, dalam memenuhi kebutuhan dalam Program Jakarta *Entrepreneur* untuk meningkatkan menjadi skala naik kelas atau pelaku usaha yang mapan.

Penerapan kategorisasi dalam program binaan Jakarta *Entrepreneur* menggunakan parameter-parameter seperti legalitas, kepemilikan aset, kepemilikan mitra, modal dan keuangan, pemasaran, tenaga kerja, kualitas produk, visi misi pemilik, kemampuan transfer knowledge, dan dampak lingkungan sekitar adalah langkah yang baik untuk memahami dan memberikan dukungan yang tepat kepada UMKM., sangat penting untuk terus memantau pertumbuhan sektor UMKM secara menyeluruh dan memperbarui kategori-kategori atau parameter-parameter yang mungkin perlu disesuaikan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan UMKM di lapangan.

Sementara, jika melihat kumpulan peraturan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu mengungkap terdapat tiga kategori wirausaha, yaitu wirausaha pencari kerja, wirausaha menengah, wirausaha naik kelas. Kemudian pada tahun 2022 Presiden Jokowi mengeluarkan aturan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 kembali melakukan kategorisasi yang lebih umum berupa wirausaha pemula, wirausaha menengah dan wirausaha mapan.

Pengembangan Kewirausahaan dalam Program Jakarta *Entrepreneur* sudah berjalan selama 5 Tahun. Sasaran dari Pengembangan Kewirausahaan dalam Program Jakarta *Entrepreneur* adalah Wirausaha Pemula, Wirausaha Menengah dan Wirausaha Naik Kelas. Ukuran keberhasilan dari Program Jakarta *Entrepreneur* yang dipakai saat ini adalah mengukur jumlah UMKM yang meningkat menjadi Wirausaha yang Mapan atau Naik Kelas yang telah

mendapatkan fasilitas baik dari legitimasi perizinan, pemasaran, Pelaporan Keuangan dan permodalan. Pada akhir tahun 2023 jumlah peserta yang sudah tergabung dalam JakPreneur berjumlah sebanyak 371.984 peserta. Dari jumlah tersebut sebanyak 66,75 % merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman. Kemudian disusul oleh warung sembako 9,38 %, fashion 7,44%, kerajinan/craft 3,41%.

Berdasarkan jumlah Pelaku UMKM yang telah bergabung menjadi anggota Jakarta *Entrepreneur* saat ini masih sedikit yang masuk kategori wirausaha mapan, adapun data kategori wirausaha dapat dilihat pada Tabel 1.6 semuanya merupakan pelaku usaha mikro dan hasil yang ada

Tabel 1.6 Data Klasterisasi Peserta Program Jakarta *Entrepreneur* Pada Tahun 2023

Klasterisasi Pelaku UMKM	Jumlah UMKM
Wirausaha Pemula	271.931
Wirausaha Menengah	96.269
Wirausaha Mapan	3.784
Total Peserta Terdaftar Jakpreneur	371.984

Sumber Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilakukan analisis bahwa Jumlah Peserta Jakarta *Entrepreneur* (Jakpreneur) sebanyak peserta Jakpreneur pada tahun 2023 adalah 371.984 orang dalam data tersebut Klasterisasi Peserta Jakpreneur Wirausaha Pemula: 271.931 orang (73,2% dari total peserta), Wirausaha Menengah: 96.269 orang (25,9% dari total peserta) dan Wirausaha Mapan: 3.784 orang (1,0% dari total peserta) sehingga Kesenjangan (GAP) antara Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah Wirausaha Pemula (271.931) dan Wirausaha Mapan (3.784) Jumlah Wirausaha Pemula jauh lebih besar dibandingkan dengan Wirausaha Mapan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta Jakarta *Entrepreneur* masih berada pada tahap awal (Wirausaha Pemula) dan belum dapat meningkatkan level usahanya menjadi Wirausaha Mapan. Tantangan dalam Peningkatan Klasterisasi Data menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan bagi sebagian besar peserta Jakpreneur untuk meningkatkan klasterisasi usahanya dari Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Menengah atau Wirausaha Mapan. Hanya sebagian kecil (1,0%) yang dapat mencapai level Wirausaha Mapan, sementara mayoritas (73,2%) masih berada pada level Wirausaha Pemula.

Upaya pengembangan wirausaha dibutuhkan upaya yang lebih intensif dari pihak terkait untuk membantu wirausaha pemula meningkatkan kapasitas dan kemampuan usahanya. Kategorisasi merupakan strategi yang vital karena memungkinkan UMKM untuk dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka. Hal ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menyediakan dukungan yang lebih tepat sasaran. Dengan memisahkan UMKM ke dalam kategori-kategori yang sesuai, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memberikan bantuan dan bimbingan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kategori. Misalnya, UMKM dengan karakteristik dan kebutuhan yang serupa dapat menerima jenis bantuan yang khusus untuk membantu Pelaku UMKM tumbuh dan berkembang.

Salah satu tantangan utama adalah menentukan kriteria kategorisasi yang tepat, yaitu parameter atau indikator yang digunakan untuk memisahkan UMKM ke dalam kelompok-kelompok yang relevan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pendekatan kategorisasi ini inklusif dan adil bagi berbagai jenis UMKM. Artinya, kriteria yang digunakan tidak boleh diskriminatif dan harus mempertimbangkan berbagai aspek dari UMKM, seperti skala usaha, sektor industri, dan tingkat pertumbuhan. Untuk itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan strategi optimalisasi dalam penerapan strategi kategorisasi UMKM sehingga dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM secara lebih efisien.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian diatas, maka yang dapat diidentifikasi masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan yang signifikan antara jumlah Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan. Dari total 371.984 peserta Jakpreneur, 73,2% masih berada pada tahap Wirausaha Pemula, sementara hanya 1,0% yang mencapai level Wirausaha Mapan.
2. Keterbatasan dalam pendampingan dan sosialisasi program, menyebabkan banyak UMKM tidak dapat memanfaatkan peluang dan dukungan yang disediakan oleh program secara optimal.
3. Kompleksitas regulasi dan birokrasi, termasuk proses perizinan yang rumit dan lambat, yang menjadi hambatan signifikan bagi UMKM dalam mengakses bantuan dan dukungan program.

4. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, termasuk pendanaan, tenaga kerja, dan fasilitas pendukung, yang menghambat implementasi program secara efektif dan menyeluruh.
5. Kurangnya keberagaman sektor usaha yang terlibat dalam program, dengan dominasi sektor makanan dan minuman sebesar 66,75% dari total peserta, menunjukkan perlunya diversifikasi dalam pengembangan UMKM.

Dari identifikasi masalah tersebut, terlihat bahwa tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan jumlah wirausaha menengah dan wirausaha mapan melalui strategi kategorisasi yang tepat dan upaya pendampingan yang intensif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Jakarta secara lebih efisien dan berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah

Untuk rumusan masalah yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Penerapan Kategorisasi Program Jakarta *Entrepreneur* Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta belum Optimal?
2. Strategi apa yang digunakan untuk Mengoptimalkan Penerapan Kategorisasi Program Jakarta *Entrepreneur* Pada Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) Di Provinsi DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Penyebab belum Optimalnya Penerapan Kategorisasi Program Jakarta *Entrepreneur* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta.
2. Merumuskan Strategi untuk Mengoptimalkan Penerapan Kategorisasi Program Jakarta *Entrepreneur* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas UMKM. Dengan memahami penyebab belum optimalnya

peningkatan kualitas, dinas terkait dapat menyesuaikan program dan kebijakan untuk lebih mendukung wirausaha pemula dalam mencapai tingkatan yang lebih tinggi.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle tentang implementasi kebijakan, khususnya pada konteks isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peningkatan kualitas anggota Jakarta Entrepreneur, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks UMKM. Hasil penelitian ini memperkaya literatur tentang tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas UMKM melalui kebijakan pemerintah, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Penelitian ini berdasarkan hasil analisis dari wawancara dengan key informan dan telaah dokumen, adapun identifikasi tersebut mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam implementasi program. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua variabel utama yaitu *Content of Policy* (Isi Kebijakan) dan *Context of Implementation* (Lingkungan Kebijakan), serta sembilan sub-variabel implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kategorisasi pada UMKM dalam Program Jakarta Entrepreneur di Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi sejumlah tantangan internal dan eksternal sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Identifikasi penyebab belum optimalnya program jakpreneur dari faktor internal dan faktor eksternal meliputi:

1) Faktor Internal

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, sektor swasta, dan platform e-commerce, sangat penting untuk membantu UMKM mendapatkan akses permodalan dan memperluas pasar. Kerjasama dengan lembaga keuangan dapat memberikan akses ke sumber pendanaan yang lebih luas dan terjangkau, sementara sektor swasta dapat menawarkan berbagai bentuk dukungan, termasuk mentorship dan peluang jaringan. Platform e-commerce, di sisi lain, membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Dengan kolaborasi yang kuat, UMKM dapat lebih mudah berkembang dan menghadapi tantangan dalam berbisnis.

Penyederhanaan regulasi dan birokrasi adalah langkah penting lainnya untuk memudahkan UMKM dalam mengakses bantuan dan dukungan program. Regulasi yang rumit dan birokrasi yang lambat sering kali menjadi hambatan besar bagi UMKM. Dengan menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses administrasi, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usahanya. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat membantu UMKM dalam operasional dan pemasaran. Penggunaan Platform digital UMKM untuk menjangkau pelanggan lebih luas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Inovasi dalam strategi pemasaran melalui media sosial juga dapat membantu UMKM mengatasi persaingan dan meningkatkan kualitas produk. Dengan strategi-strategi ini,

program Jakpreneur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan UMKM di DKI Jakarta.

2) Faktor Eksternal

Regulasi yang rumit dan birokrasi yang lambat merupakan hambatan signifikan bagi UMKM dalam mengakses bantuan dan dukungan program Jakpreneur. Kompleksitas regulasi sering kali membuat pelaku UMKM kesulitan memahami dan memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga proses mendapatkan dukungan menjadi sangat memakan waktu dan tidak efisien. Birokrasi yang lambat juga memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin dan dokumen lainnya, mengakibatkan banyak UMKM yang akhirnya tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh program. Penyederhanaan regulasi dan percepatan birokrasi sangat diperlukan agar UMKM dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk berkembang.

Fluktuasi ekonomi dan kebijakan nasional yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, berdampak pada efektivitas program Jakpreneur. Ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar, dapat meningkatkan biaya operasional UMKM dan mengurangi daya beli konsumen, sehingga menghambat pertumbuhan bisnis pelaku UMKM. Selain itu, perubahan kebijakan nasional yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian bagi UMKM, menghalangi pelaku UMKM untuk membuat rencana jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih stabil dan mendukung, serta mitigasi risiko ekonomi untuk memastikan bahwa UMKM dapat bertahan dan terus berkembang di tengah kondisi yang berubah-ubah.

b. Strategi optimalisasi program dari faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan analisis SWOT meliputi:

1) Faktor Internal

Peningkatan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM serta para implementor kebijakan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu UMKM memahami dan mengaplikasikan kebijakan serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal. Selain itu, pelatihan yang terfokus pada peningkatan kapasitas UMKM dan kemampuan para implementor kebijakan akan meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan program dengan baik. Dengan

demikian, hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM dapat diminimalisir dan keberhasilan program dapat lebih terjamin.

Selain itu, peningkatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai fasilitas dan dukungan yang tersedia juga merupakan langkah krusial. Banyak UMKM yang tidak memanfaatkan peluang yang ada karena kurangnya informasi yang diterima. Oleh karena itu, program harus lebih aktif dalam menyebarkan informasi melalui berbagai media, seperti media sosial, seminar, dan lokakarya. Di sisi lain, partisipasi UMKM dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi atau survei kebutuhan akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan melibatkan UMKM secara langsung, kebijakan dapat lebih responsif dan efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM.

2) Faktor Eksternal:

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, sektor swasta, dan platform e-commerce, sangat penting untuk membantu UMKM mendapatkan akses permodalan dan memperluas pasar. Kerjasama dengan lembaga keuangan dapat memberikan akses ke sumber pendanaan yang lebih luas dan terjangkau, sementara sektor swasta dapat menawarkan berbagai bentuk dukungan, termasuk mentorship dan peluang jaringan. Platform e-commerce, di sisi lain, membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Dengan kolaborasi yang kuat, UMKM dapat lebih mudah berkembang dan menghadapi tantangan dalam berbisnis.

Penyederhanaan regulasi dan birokrasi adalah langkah penting lainnya untuk memudahkan UMKM dalam mengakses bantuan dan dukungan program. Regulasi yang rumit dan birokrasi yang lambat sering kali menjadi hambatan besar bagi UMKM. Dengan menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses administrasi, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat membantu UMKM dalam operasional dan pemasaran. Platform digital memungkinkan UMKM untuk menjangkau pelanggan lebih luas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Inovasi dalam strategi pemasaran melalui media sosial juga dapat membantu UMKM mengatasi persaingan dan meningkatkan kualitas produk. Dengan strategi-strategi ini, program Jakpreneur diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan UMKM di DKI Jakarta.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi optimal harus mampu meminimalkan kelemahan dan ancaman sambil memaksimalkan kekuatan dan peluang. Penguatan komitmen pemerintah dalam penerapan kategorisasi UMKM, peningkatan infrastruktur dan fasilitas, serta kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengembangan usaha UMKM menjadi langkah-langkah penting. Selain itu, sosialisasi program secara berkala dan monitoring serta evaluasi terkait keberhasilan program juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program ini.

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi penerapan kategorisasi pada UMKM dalam Program Jakarta Entrepreneur di Provinsi DKI Jakarta harus mencakup perbaikan pendampingan, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan sosialisasi, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, penyederhanaan regulasi, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program Jakarta Entrepreneur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan UMKM di DKI Jakarta.



B. SARAN

Penelitian mengenai Penerapan Kategorisasi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Program Jakarta *Entrepreneur* Di Provinsi DKI Jakarta dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas Program Jakarta Entrepreneur, disarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai fasilitas dan bantuan yang tersedia bagi UMKM. Sosialisasi yang lebih intensif dan terarah akan membantu UMKM memahami dan memanfaatkan peluang yang ada dalam program ini, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan manfaat yang dirasakan oleh para pelaku usaha. Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan dan birokrasi yang seringkali menjadi hambatan bagi UMKM. Prosedur yang lebih efisien dan transparan akan memudahkan UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk. Pelatihan tentang proses perizinan dan regulasi yang berlaku juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan UMKM dalam mengelola aspek legalitas usahanya.

Penting juga bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program bagi UMKM. Melibatkan pelaku UMKM secara langsung melalui forum konsultasi, survei kebutuhan, atau mekanisme lainnya akan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Hal ini juga akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen dari para pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan. Kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti lembaga keuangan, sektor swasta, dan platform e-commerce perlu ditingkatkan untuk mendukung akses permodalan dan pemasaran bagi UMKM. Melalui kerja sama ini, UMKM dapat memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar mereka. Pemerintah juga perlu mendorong sinergi antara UMKM dan industri besar untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah Saran yang dapat disamapaikan dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Program Jakpreneur dapat terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, organisasi bisnis, dan komunitas lokal, untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber daya dan peluang pengembangan misalnya pelatihan keterampilan manajemen bagi para pengusaha UMKM yang akan melakukan

ekspor, termasuk manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk untuk proses ekspor.

2. Pemerintah menyediakan fasilitas tempat usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti fasilitas produksi bersama, pusat distribusi, atau ruang kerja bersama (*co-working spaces*).
3. Perubahan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) untuk mengakomodir Penerapan Kategorisasi Pada Binaan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah Dalam Program Jakarta Entrepreneur sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024; dan
4. Pembuatan standar operasional prosedur (SOP) serta rumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta untuk target dan sasaran peningkatan kelompok usaha sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan peningkatan kelompok usaha dari kelompok wirausaha baru menjadi wirausaha mapan.
5. Pembentukan Tim untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap wilayah guna mengukur tingkat keberhasilan dari program kerja yang sudah diberikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Untuk metode pengukuran dapat dilakukan melalui kuesioner secara sampling untuk beberapa binaan yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainaa Maulidya Zahra, Novie Indrawati Sagita (2023) “Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara
- Alwan Adyuhnaf, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta
- Arianto, B. (2022). Dominasi Motivasi Kerja, Kompensasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Loyalitas Tenaga Kependidikan: Study Kasus. Helper: Jurnal Bimbingan
- Buku Kajian Eskalasi Kualitas Jakpreneur Provinsi DKI Jakarta (2022) jilid 3, Pusat penelitian geografi terapan LST, FMIPA Universitas Indonesia.
- Bryson, J. M. (2022). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial (Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations) (Cetakan X). Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik Data diunduh pada tanggal 22 Agustus 2023 <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/10/13/9f14d43dc0c01b6d1883fb7c/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2019-2023.html>
- Christian Punu, Sofia E Pangemanan, Neni Kumayas, (2021) “Efektifitas program Pemberdayaa Masyarakat Bagi UKM di Kota Manado” *Jurnal Governance* Vol.1, No. 2, 2021 ISSN: 2088-2815
- Churchill, NC, & Lewis, VL. (1983). *The five stages of small business growth. Harvard Business Review*, 61(3), 30–50
- Curran, J. (2000). What is small business policy in the UK for? *Evaluation and assessing small business policies. International Small Business Journal*, 18(3), 36–51
- Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10.
- Davidsson, P, & Delmar, F. (1997). *High-growth firms: characteristics, job contribution and method observations. Mannheim: RENT XI Conference.*
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Website [http://www. Jakpreneur.Jakarta.go.id](http://www.Jakpreneur.Jakarta.go.id) pengelolaan data diunduh pada tanggal 21 September 2023
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Dye, T. R. (2005). Understanding public policy. New Jersey: Pearson Education Inc.

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Elizabeth Anna (2023) Tesis Implementasi Kebijakan Program Jakpreneur dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, STIA LAN Jakarta Tahun 2023
- Fauziah dan Jumiati (2020) jurnal “Efektifitas Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Purus Kota Padang”. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Volume 2 Nomor 4 Tahun 2020
- Fernando S Solang (2019) jurnal “Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan” Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019.
- Gibb, AA. (2000). *SME policy, academic research and the growth of ignorance, mythical concepts, myths, assumptions, rituals and confusions. International Small Business Journal*, 18(3), 13–36
- Greiner, L. (1972). *Evolution and revolution as organizations grow. Harvard business review. Journal of Small Business Management*, 472, 37–46.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World* (1 ed.). Princeton University Press.
- Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 16
- Ita Rosita, Harapan Tua Ricky Freddy S (2022) “Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. (N. Budiman, Editor). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Julialevi, K. O. (2022). *International Conference on Sustainable Competitive Advantage 2022 Society 5.0 As A Solution for Small and Medium Micro Businesses in Pandemic Times*. 53–71.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 420 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Produksi dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru.
- Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana Prasarana Produksi Dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Data diunduh 21 September 2023
Website: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html#:~:text=UMKM%20yang%20ada%20di%20Indonesia%2C%20sebagian%20besar%20merupakan,dapat%20menyerap%20tenaga%20kerja%20123%2C3%20ribu%20tenaga%20kerja>.
- Kementerian Koperasi UKM Data diunduh 22 September 2023 Website: https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Usaha Di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Lia Fitriani, Muhammad Ali, dan Lalu Hendra M (2021) “Efektifitas Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid 19 Tahun 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB” *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)* Vol 2 No 1 Maret 2021
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Machmud, TM dan Rizki NS. 2009. *Small and Medium Enterprises in Regional Production Networks : An Indonesian Case. Eria Research Project Research* No 8.
- Marczyk, G., Dematteo, D. & Festinger, D. (2005). *Essentials of Research Design and Methodology*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. retrieved from [http://library.aceondo.net/ebooks/Education/Wiley_Essentials_Of_Research_Design_And_Methodology_\(2005\)_Ling_Lotb.pdf](http://library.aceondo.net/ebooks/Education/Wiley_Essentials_Of_Research_Design_And_Methodology_(2005)_Ling_Lotb.pdf)
- Mitra, R, & Pingali, V. (1999). Analysis of growth stages in small firms: a case study of automobile ancillaries in India.
- Mazmanian, D., & Sabastier. (2006). *Effective Policy Implementation*. Lexington, Mass: DC Heath.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nayla, Akifa P. 2014. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana.
- Nuryanti, M. (2015). *Pemahaman kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Cet. 1). Leutika Prio
- Pasaribu, R. B. F. (2009) ‘Pembangunan Daerah’. Depok Jawa Barat: Gunadarma.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Ragimun, Sudaryanto, & Wijayanti, R. R. (2015). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Web Kementerian Keuangan, 1–32.
- Randy R. Wrihatnolo and Riant Nugroho Dwidjowijoto (2013) Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar Dan Panduan, Journal of Chemical Information and Modeling. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta
- Rangkuti, F. (2021). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis (Cetakan ke). PT. Gramedia Pustaka Utama
- Resalawati, Ade. 2011. Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM Indonesia. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Robiyanto, Febra. 2004. Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah. Semarang: Studi Nusa
- Safi'i, M. (2009) Manajemen pembangunan daerah: teori dan aplikasi. Averroes Press
- Sato, Y. (2015). Development of Small and Medium Enterprises in the Asean Economies. BEYOND, 154-181.
- Siagian, S.P., (2003). Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang, Lusia. 2003. Usaha Kecil Menengah dan Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Smallbone, D, & Wyer, P. (2000). Growth and development in the small firm. In S Carter & D James-Evans (Eds.), Enterprise and small business (pp. 391–400). Harlow: Prentice Hall
- Sofjan Assauri, Strategic Management, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.4-7
- Subarsono, A. (2011) "Analisis Kebijakan Publik (Konse, Teori, dan Aplikasi)"Pustaka Belajar.
- Suprpti. 2005. Teknologi Pengolahan Pangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukirno, Sadono. 2005. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Cetakan ke). Alfabeta.
- Suryana (2006:6), Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses menuju Sukses, Edisi Ketiga Penerbit Salemba, Jakarta

- Syaiful Bahri, (2021), Jurnal “Implementasi Program Jakpreneur Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, UIN, Jakarta
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi kebijakan publik: Transformasi pemikiran. Yogyakarta: Y.A.P.
- Tonge, R, Larsen, P, & Roberts, M. (2000). Information systems investment within high-growth medium-sized enterprises. *Management Decision*, 38(7), 489–502.
- Tulus, T.H. Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2005). The policy implementation process: A conceptual framework. Beverly Hills: Sage Publications, Inc
- Wahab, A., & Solichin. (2002). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- Winardi, J. 2003. Teori organisasi dan pengorganisasian. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Website <https://databoks.katadata.co.id/search/cse?search=umkm> Data diunduh 21 September 2023
- Yustika, Ahmad Erani. 2005. *Perekonomian Indonesia Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Malang: Bayumedia.